

RKT

(Rencana Kinerja Tahunan)

Dinas
pmpptsp



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

Jalan Ngurah Rai Nomor 72 Singaraja
Telp/Fax: (0362) 22063
website : dpmptsp.bulelengkab.go.id
email: dpmptsp@bulelengkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat karunianya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan ini, diharapkan dapat menjadi bahan



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng

pelaksanaan kegiatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 2 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kabupaten Buleleng



Dr. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611231 198603 1 225



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	3
1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	6
BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.2. Indikator dan Target Kinerja	8
BAB III PENUTUP.....	10
LAMPIRAN.....	1



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat menjadi salah satu cita-cita yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah maupun bagi masyarakat. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu wujud nyata niat pemerintah untuk memerangi korupsi baik secara represif maupun preventif. Penanganan masalah pemberantasan korupsi tidak dapat lagi dilakukan secara sporadis/parsial, namun membutuhkan suatu pola komprehensif dan sistematis. Penanganan tindak korupsi secara sistematis ini antara lain dilakukan dari segi preventif melalui perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan adanya transparansi dan akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, RKPD dijabarkan lagi



*Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng*

dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng disusun dengan mencermati perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada RKPD Tahun 2020 yang disajikan dalam rencana program sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator sasaran, urusan, anggaran dan SKPD penanggungjawab. Rencana Kinerja Tahunan SKPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Periode 2017-2022 dan menjadi momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional dalam hal peningkatan investasi melalui penanaman modal dan pelayanan publik khususnya di bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Dengan disusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 ini, diharapkan indikator kinerja dan target capaian kinerja dapat terukur dan dicapai sehingga terwujudnya “*Good Governance*”.



1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksanaan dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan PTSP bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng memiliki tugas pokok “Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Administrasi Perizinan”. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan
3. Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM
 - b) Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan Penanaman Modal
4. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
 - a) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
 - b) Kepala Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II



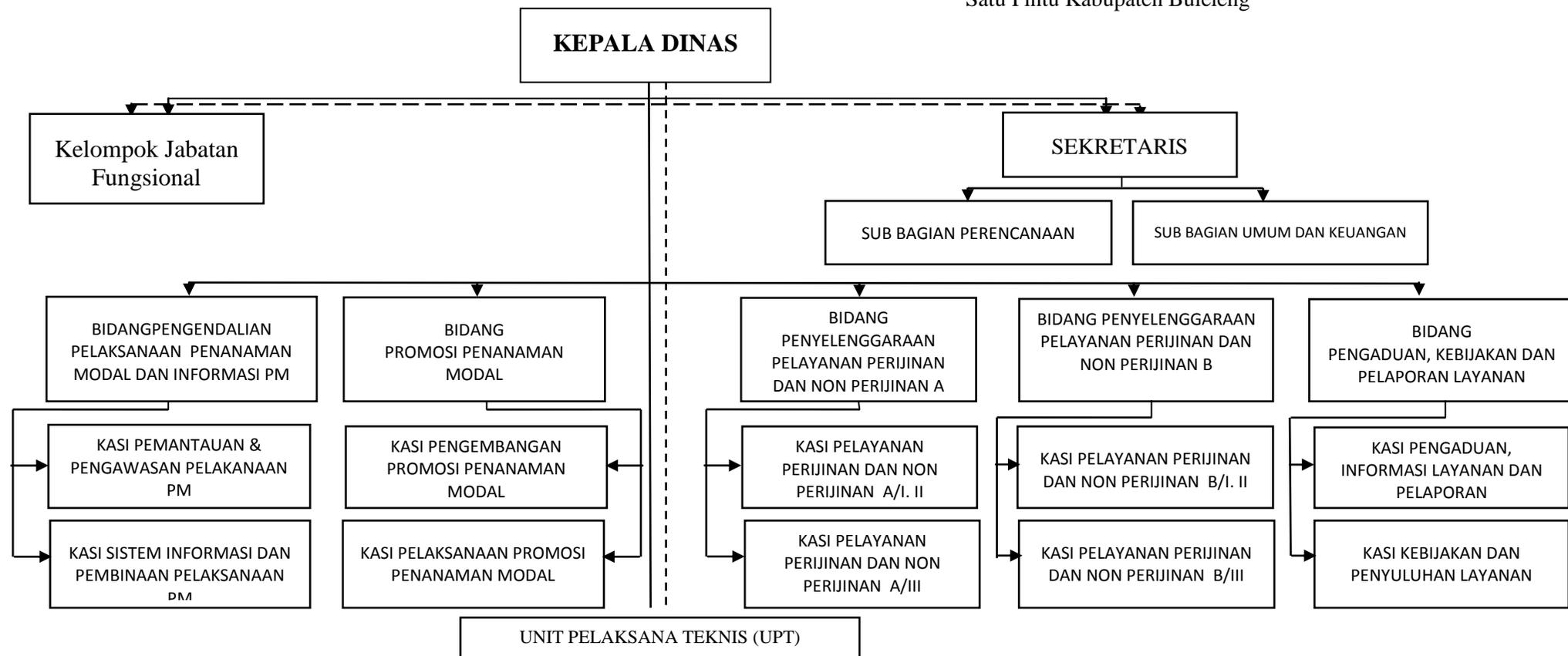
- b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 6. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
 - a) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
 - b) Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 7. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
 - a) Kepala Seksi Pengaduan, Informasi Layanan dan Pelaporan
 - b) Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Tabel struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada Tabel 1.1



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG

Nomor : 75 Tahun 2016
Tanggal : 28 Desember 2016
Tentang : Kedudukan, Susunan, Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng





1.3. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen Perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Adapun tujuan umum diterapkannya Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rencana Kinerja Tahunan adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diberikan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Buleleng, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu berpedoman pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng lima tahun kedepan 2017 - 2022 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana“** dengan Misi I) Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif; 2) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah; 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas; 4) Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan; 5) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik; 6) Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Buleleng menyelaraskan tujuan sasaran Perangkat Daerah dengan Misi Kepala Daerah terpilih yaitu Misi 1 (satu) yaitu **”Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif “** pada sektor Investasi dan penanaman modal. Misi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk menciptakan **“daya saing“** dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Untuk mewujudkan Visi dan



Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng merumuskan Renstra lima tahun kedepan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sistem informasi Investasi
- b. Perumusan Kebijakan yang mendukung Pertumbuhan Investasi
- c. Peningkatan pelayanan Perijinan pada PTSP
- d. Peningkatan Peluang Potensi Investasi
- e. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasai Investasi

2.2 Indikator dan Target Kinerja

Didalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan kuantitatif dan kualitatif dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Indikator Kinerja dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan



pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2020 sebagai Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. RKT 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 dapat dilihat dalam Lampiran Rencana Kinerja Tahunan.



BAB III

PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran. Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2020 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2020 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi / kerja. Dengan demikian Rencana Kinerja Tahunan ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja dan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasannya dan kepada masyarakat. Selain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen



Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng

pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang baik (*good governance*) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna, transparansi, bersih serta bertanggungjawab.

Semoga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng ini bisa digunakan sebagai parameter dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja Dinas. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



Dr. I Putu Artawan
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19611231 198603 1 225

LAMPIRAN

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						Keterangan			
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target					
1	2	3	4	5	6	7		8	9				
1	Meningkatnya kerjasama di bidang investasi	1	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	2 Kali	15	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	001	Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah kerjasama antar pengusaha besar dan UMKM yang ditindaklanjuti dengan MoU	2	Kali	Rp 101.469.800	Seksi Pelaksanaan Promosi PM
		2	Jumlah investor	5 Investor			013	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang berminat menanamkan modalnya	5	Investor	Rp 114.600.000	
							014	Penyusunan Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	Jumlah sarana prasarana promosi penanaman modal yang siap pakai	7	Kali	Rp 122.840.000	Seksi Pengembangan Promosi PM
2	Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	3	Nilai investasi	1.261.266.173.000 Rupiah	19	Perencanaan dan Peningkatan Realisasi Investasi	001	Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah sistem informasi penanaman modal yang disusun dan diupgrade	1	Sistem	Rp 130.200.000	Seksi Sistem Informasi dan Pembinaan PM
							002	Kajian Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	1	Dokumen	Rp 99.300.000	
							004	Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pengusaha yang paham dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100	Pengusaha	Rp 21.580.000	
							003	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi LKPM yang disusun	4	Dokumen	Rp 117.380.000	Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan PM

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN							Keterangan			
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target						
1	2	3		4	5	6	7		8	9				
					005	Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun	1	Sistem	Rp	98.600.000			
					007	Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi	Jumlah dokumen kajian potensi sumberdaya yang disusun	1	Dokumen	Rp	110.600.000			
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	20	Program Peningkatan Sistem Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Layanan	001	Penyusunan Data dan Pelaporan Pelayanan Perizinan	Jumlah buku penyusunan data dan pelaporan pelayanan perizinan	4	Buku	Rp	63.250.000	Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
							002	Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah media sosialisasi perizinan	3	Media	Rp	104.000.000	
							003	Evaluasi Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan	Jumlah dokumen laporan evaluasi tingkat kepuasan masyarakat yang disusun	2	Dokumen	Rp	74.000.000	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan A	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan A	81,00 Nilai	21	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan dan Non Perizinan Bidang A	012	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A I.II pada sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU	Jumlah permohonan izin sektor Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Ijin Lokasi, IMB, Ijin Prinsip, HO/SITU yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	2500	Ijin	Rp	288.840.000	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I.II
							013	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat A III pada Sektor Pertanian, Perikanan, IUJK, dan Reklame	Jumlah permohonan izin sektor Pertanian, Perikanan, IUJK, dan Izin Reklame yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	500	Ijin	Rp	178.290.000	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						Keterangan			
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target					
1	2	3		4	5	6	7	8	9				
5	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan B	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan B	81,00 Nilai	22	Program Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B	014	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penerbitan Perijinan Masyarakat B I.II pada Sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan	Jumlah berkas permohonan perizinan sektor Perindustrian, Perdagangan dan Pendidikan yang ditindaklanjuti sesuai standar pelayanan	1500	Ijin	Rp 230.180.000	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I.II
							015	Proses Penelitian Berkas Permohonan dan Penelitian Perijinan Masyarakat B III pada Sektor Pariwisata dan Kesehatan	Jumlah berkas permohonan perijinan sektor Pariwisata dan Kesehatan yang diverifikasi dan diteliti sesuai standar pelayanan	1500	Ijin	Rp 271.180.000	Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
6	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	7	Persentase kepuasan masyarakat dan aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan kantor	100 %	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim	1300	Exemplar	Rp 61.200.000	Sub Bagian Umum dan Keuangan
							002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet, air dan listrik dibayar tepat waktu	84	Rekening Kantor	Rp 75.000.000	
							003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kendaraan yang disewa	24	Unit/Tahun	Rp 199.200.000	
							006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang perijinannya tepat waktu	21	Unit	Rp 7.800.000	
							007	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan administrasi keuangan yang disusun	1	Dokumen	Rp 128.600.000	
							008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor tersedia tepat waktu	29	Jenis	Rp 171.802.000	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						Keterangan		
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target				
1	2	3	4	5	6	7		8	9			
				010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK tersedia tepat waktu	53	Jenis	Rp 232.427.000			
				011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan tersedia tepat waktu	11	Jenis	Rp 15.060.000			
				012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang memadai	4	Jenis	Rp 5.000.000			
				013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	127	Unit	Rp 473.032.000			
				015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	36	Rekening	Rp 8.400.000			
				017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	7	Jenis	Rp 46.300.000			
				018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	115	OH	Rp 135.000.000			
				022	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	1	Dokumen	Rp 48.350.000			
	8	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi	100 %	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	003	Pengadaan Mebeleur	Jumlah sarana prasarana	2	Set	Rp 20.000.000	
						012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	Jumlah jenis sarana/prasarana upacara yang diselenggarakan	7	Jenis	Rp 182.200.000	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						Keterangan				
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian		Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target					
1	2	3		4		5	6	7			8	9		
					019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah keikutsertaan dalam lomba peringatan hari-hari besar	13	Kegiatan	Rp	34.100.000			
					024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	21	Unit	Rp	188.400.000			
					026	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	7	Unit	Rp	7.000.000			
					028	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang memadai	15	Unit	Rp	5.000.000			
					045	Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset yang ditata	1	Dokumen	Rp	22.800.000			
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	9	Persentase akuntabilitas kinerja SKPD	100%	03	Peningkatan Disiplin Aparatur	006	Pembinaan Rohani Dan Budaya Aparatur	Jumlah pembinaan rohani dan budaya aparatur yang dilaksanakan	1	Kali	Rp	120.000.000	
					05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	006	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis dengan baik	4	OH	Rp	20.000.000	
					06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	6	Dokumen	Rp	31.175.000	
							004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu	1	Laporan	Rp	6.800.000	

SASARAN/CAPAIAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN						Keterangan
Uraian	Indikator	Target/ Satuan		Uraian	Indikator Kinerja Keluaran	Satuan		Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	10 Jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	07 Perencanaan Anggaran SKPD	001 Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen anggaran SKPD yang disusun	4 Dokumen	Rp 104.108.200			
TOTAL							Rp 4.475.064.000			

Singaraja, 2 Januari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



Drs. I Putu Artawan

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19611231 198603 1 225